

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan pemerataan pendapatan. Banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi disertai dengan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan yang tinggi tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial, menghambat mobilitas ekonomi masyarakat, serta memperlambat pembangunan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020).

Ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan Gini Ratio, yaitu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin mendekati angka satu, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi. Menurut (World Bank, 2022), ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia serta menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan meskipun berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2022), Gini Ratio Indonesia mengalami peningkatan dari 0,381 pada tahun 2019 menjadi 0,384 pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 sebelum kembali menurun secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif karena manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat dan wilayah.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan. Namun, apabila manfaat pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu, maka ketimpangan pendapatan justru dapat meningkat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan peran ekonomi terbesar di Indonesia (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Berdasarkan data (Kemenkeu RI, 2024), Jawa Timur menyumbang sekitar 14 hingga 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga menempatkannya sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi

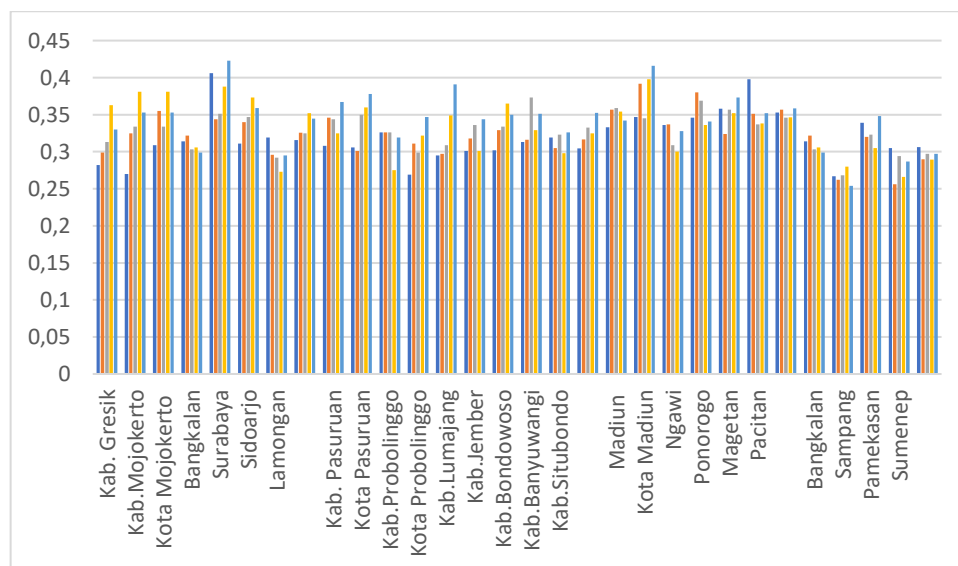
terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dinamis dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah provinsi. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antardaerah tersebut turut memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat yang tercermin dalam nilai Gini Ratio.

Ketimpangan pendapatan di Jawa Timur terlihat jelas ketika membandingkan kawasan Gerbangkertosusila dengan wilayah lain, khususnya kawasan Tapal Kuda. Kawasan Gerbangkertosusila berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh konsentrasi industri pengolahan, sektor jasa modern, infrastruktur yang lebih maju, serta tingginya arus investasi (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023). Kondisi tersebut mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, memperluas kesempatan kerja formal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Akibatnya, wilayah ini memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Timur (Salsavira & Setiawati, 2025).

Sebaliknya, kawasan Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo masih menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang beragam antarwilayah. Struktur ekonomi kawasan ini sebagian besar masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor informal yang memiliki produktivitas relatif rendah

(Winjaya & Taufiq, 2023). Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antardaerah, keterbatasan kesempatan kerja formal, serta akses yang belum merata terhadap pendidikan dan infrastruktur menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat di kawasan Tapal Kuda (Santoso, 2023).

Gambar 1. 1 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Ekonomi Kawasan Jawa Timur



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, secara umum di kawasan Jawa Timur berada pada kategori ketimpangan sedang dengan nilai Gini Ratio berkisar antara 0,25 hingga 0,42 selama periode 2019–2023. Namun demikian, terdapat variasi yang cukup mencolok antarkawasan maupun antardaerah di dalamnya.

Kawasan Gerbangkertosusila, yang meliputi Gresik, Mojokerto, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, menunjukkan nilai Gini Ratio yang relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan lain, terutama di Kabupaten

Bangkalan dan Kota Surabaya yang pada beberapa tahun mencatatkan nilai mendekati 0,40. Tingginya ketimpangan di kawasan ini sejalan dengan struktur ekonominya yang dualistik, di mana pertumbuhan sektor industri dan jasa modern yang pesat belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan Gerbangkertosusila dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural. Pertama, konsentrasi industri manufaktur dan jasa modern di kawasan ini menciptakan kesenjangan upah yang tajam antara tenaga kerja terampil di sektor formal dengan tenaga kerja informal yang masih mendominasi sebagian wilayah pinggiran seperti Bangkalan (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023). Kedua, arus urbanisasi dan migrasi penduduk dari wilayah lain menuju Surabaya dan sekitarnya meningkatkan persaingan tenaga kerja, sehingga sebagian pendatang hanya terserap di sektor informal berupah rendah, sementara penduduk dengan keterampilan dan modal lebih besar menikmati manfaat ekonomi kota secara lebih penuh. Ketiga, tingginya harga lahan dan konsentrasi kepemilikan aset produktif di kawasan industri menyebabkan sebagian besar manfaat pertumbuhan dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki modal, bukan oleh pekerja bergaji. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa kawasan dengan aktivitas ekonomi paling dinamis di Jawa Timur ini justru mencatatkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan lain.

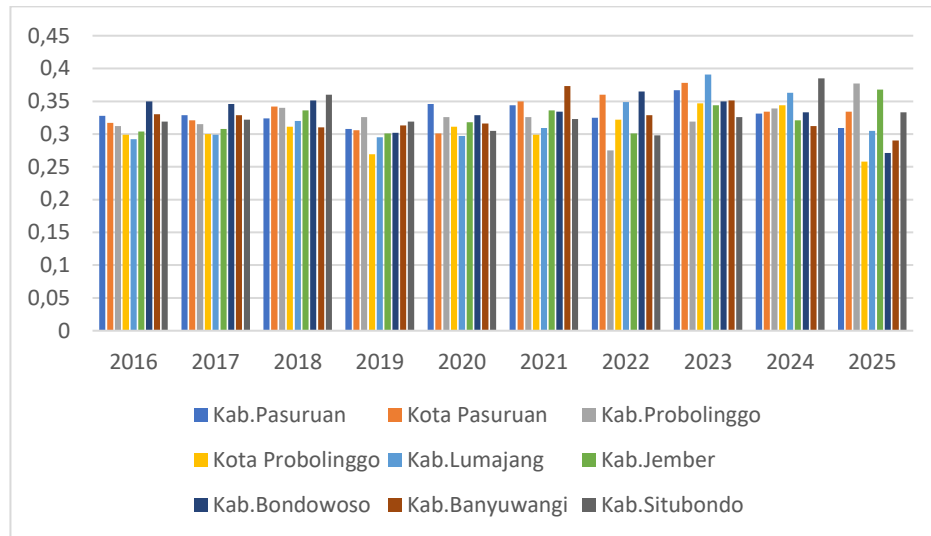
Sementara itu, kawasan Mataraman yang meliputi Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan secara umum memiliki nilai Gini Ratio yang

cenderung stabil dan sedikit lebih rendah, berkisar antara 0,28 hingga 0,37. Kondisi ini mengindikasikan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, meski juga mencerminkan kapasitas ekonomi yang lebih terbatas dengan tingkat aktivitas ekonomi formal yang tidak setinggi Gerbangkertosusila.

Adapun kawasan Tapal Kuda, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan nilai Gini Ratio yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode pengamatan. Kabupaten Lumajang tercatat memiliki nilai ketimpangan tertinggi di kawasan ini dengan nilai mendekati 0,39 pada tahun 2023, sedangkan Kota Probolinggo relatif lebih rendah dibanding daerah lain di kawasan yang sama.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi wilayah Tapal Kuda yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan informal menyebabkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata di antara penduduknya. Kondisi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda dapat diamati melalui perkembangan nilai *Gini Ratio* pada periode 2016-2025 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Gini Ratio Wilayah Tapal Kuda 2016-2025



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio pada kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda selama periode 2016–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Secara umum, nilai Gini Ratio berada pada kisaran 0,26–0,39 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah hingga sedang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan tingkat ketimpangan yang cukup nyata antarwilayah, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara merata pada seluruh kabupaten/kota di kawasan Tapal Kuda.

Kabupaten Lumajang tercatat sebagai daerah yang cenderung memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2022–2023, nilai Gini Ratio Kabupaten Lumajang mencapai kisaran 0,39. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Selain Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dengan

nilai Gini Ratio yang beberapa kali berada di atas rata-rata wilayah Tapal Kuda. Tingginya ketimpangan pada kedua daerah tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Sebaliknya, Kota Probolinggo merupakan daerah yang relatif memiliki tingkat ketimpangan paling rendah selama periode pengamatan. Nilai Gini Ratio Kota Probolinggo cenderung berada pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat relatif lebih merata. Selain itu, Kabupaten Jember juga memperlihatkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah dan stabil dibandingkan sebagian besar kabupaten lain di wilayah Tapal Kuda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan hasil pembangunan pada kedua daerah tersebut berlangsung lebih baik dibandingkan daerah yang memiliki tingkat ketimpangan lebih tinggi.

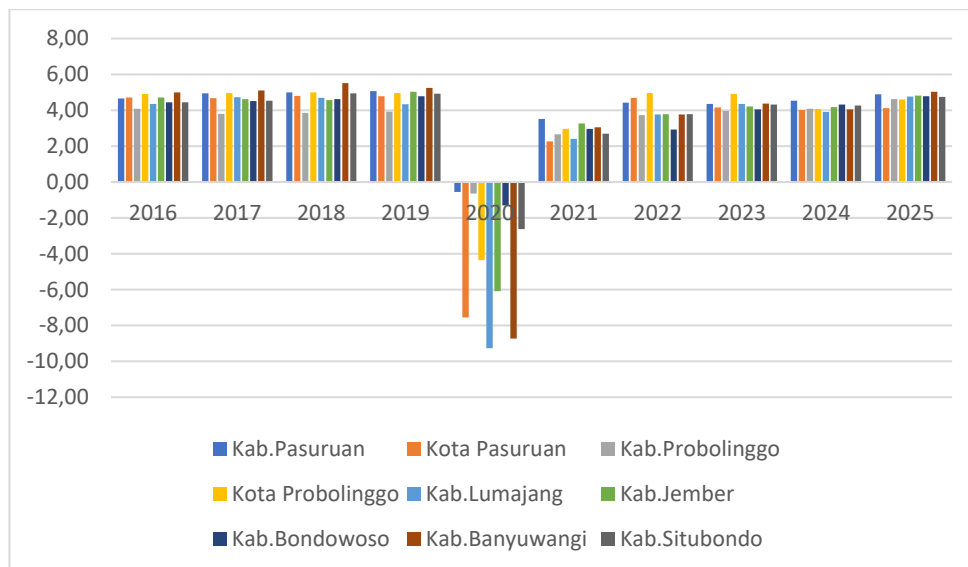
Perbedaan tingkat ketimpangan antarwilayah di kawasan Tapal Kuda tidak terlepas dari perbedaan karakteristik struktural masing-masing daerah. Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi, yang mencatatkan Gini Ratio relatif tinggi, memiliki struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan dengan pola kepemilikan lahan yang timpang, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik lahan dan modal usaha. Sebaliknya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Jember yang mencatatkan ketimpangan lebih rendah memiliki struktur ekonomi perkotaan yang lebih beragam, dengan sektor perdagangan dan jasa skala kecil-menengah yang menyerap tenaga kerja secara lebih merata serta akses pendidikan dan infrastruktur yang relatif lebih baik. Perbedaan struktural inilah

yang menjadikan Teori Kuznets relevan untuk dikaji lebih lanjut, karena variasi ketimpangan tersebut diduga mencerminkan posisi masing-masing daerah pada tahapan transformasi ekonomi yang berbeda

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif Teori Kuznets. Menurut Kuznets (1955), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan membentuk pola kurva U terbalik (inverted U-curve). Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan karena manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat atau sektor ekonomi tertentu. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi, manfaat pertumbuhan mulai menyebar secara lebih merata sehingga ketimpangan pendapatan akan menurun. Dengan demikian, tingkat ketimpangan yang berbeda antarwilayah dapat mencerminkan perbedaan tahapan pembangunan ekonomi yang sedang dialami masing-masing daerah.

Variasi tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah di kawasan Tapal Kuda menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan tahapan transformasi ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kuznets. Kabupaten Lumajang yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi diduga masih berada pada tahap awal pembangunan ekonomi, Kabupaten Bondowoso merepresentasikan kondisi transisi, sedangkan Kota Probolinggo yang memiliki tingkat ketimpangan relatif rendah diduga telah memasuki tahap pembangunan yang lebih maju dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Tapal Kuda 2016-2025 (Persen)

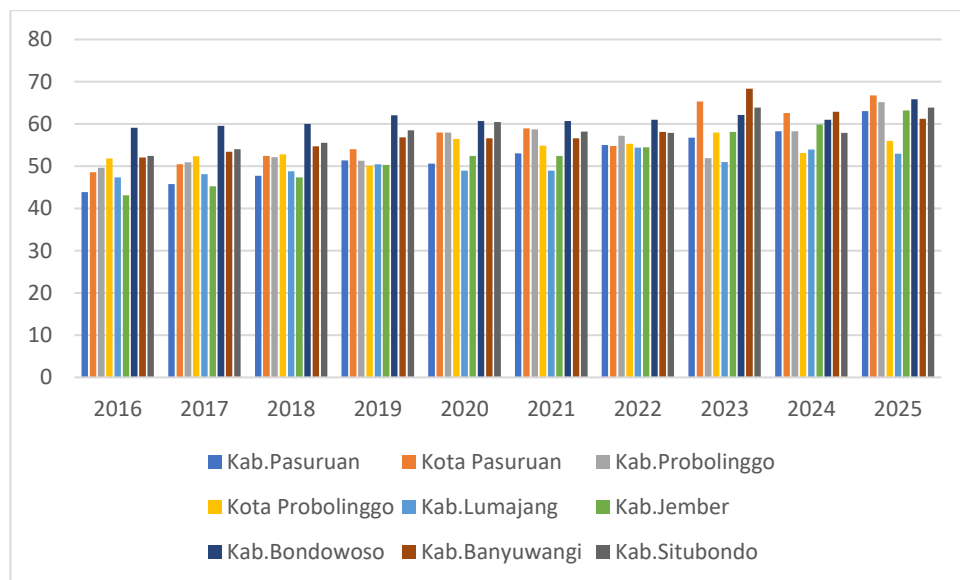


Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.3, laju ekspansi ekonomi kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda selama periode 2016–2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada periode 2016–2019, seluruh daerah mencatat kinerja ekonomi yang relatif stabil pada kisaran 4–6 persen per tahun. Namun, pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka pertumbuhan berada pada nilai negatif. Memasuki tahun 2021, perekonomian wilayah Tapal Kuda mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan kembalinya laju PDRB ke zona positif. Selanjutnya pada periode 2022–2025, sebagian besar kabupaten/kota mampu mempertahankan kinerja ekonomi pada kisaran 3–5 persen. Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah yang relatif konsisten mencatat capaian ekonomi lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya.

Meskipun ekspansi ekonomi pascapandemi menunjukkan tren yang positif, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Pada beberapa daerah, kinerja ekonomi yang meningkat justru disertai dengan kenaikan nilai Gini Ratio. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Dengan demikian, tingginya laju perekonomian daerah belum tentu menjamin terciptanya pemerataan pendapatan apabila tidak diiringi dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Gambar 1. 4 TPAK Wanita Kabupaten/Kota Wilayah Tapal Kuda 2016-2025 (Persen)



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.4, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di wilayah Tapal Kuda selama periode 2016–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif meningkat, meskipun masih terdapat fluktuasi antar tahun dan antar kabupaten/kota. Secara umum, nilai TPAK wanita berada pada

kisaran 43–68 persen. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja mengindikasikan semakin besarnya keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi di wilayah Tapal Kuda.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kota Pasuruan secara konsisten mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2023, misalnya, Kabupaten Banyuwangi mencatat TPAK wanita tertinggi, yaitu sekitar 68 persen. Sebaliknya, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, meskipun menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun terakhir.

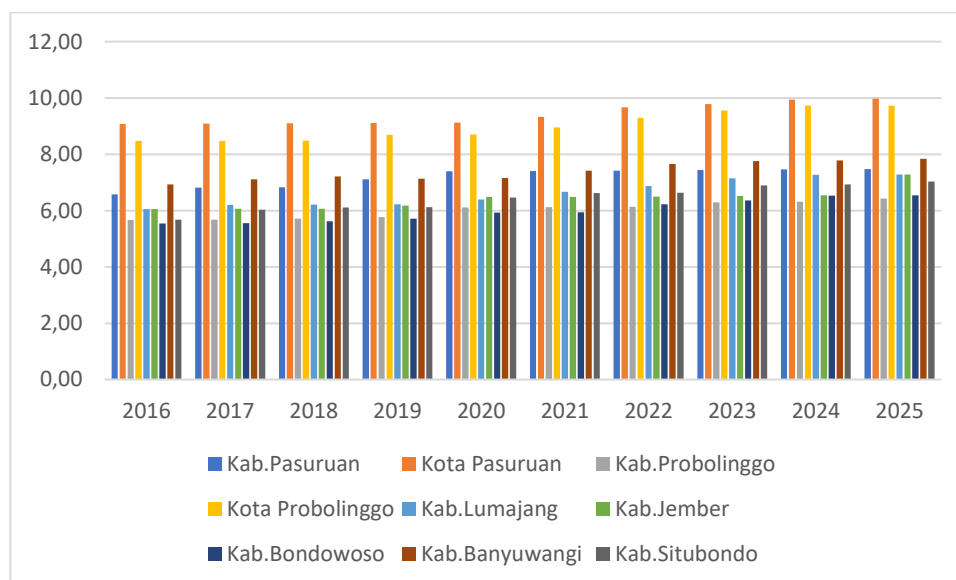
Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita antarwilayah tersebut mencerminkan adanya variasi dalam kesempatan kerja, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta akses perempuan terhadap pasar kerja. Daerah yang memiliki sektor industri, perdagangan, dan jasa yang lebih berkembang cenderung mampu menyerap tenaga kerja wanita dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dan pekerjaan informal.

Secara keseluruhan, peningkatan TPAK wanita di wilayah Tapal Kuda menunjukkan adanya perkembangan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu diikuti oleh kualitas pekerjaan yang memadai. Dominasi pekerjaan informal, perbedaan tingkat upah, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif

masih berpotensi membatasi kontribusi tenaga kerja wanita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi kerja perempuan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan agar dapat mendukung pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Selain faktor ketenagakerjaan, tingkat pendidikan juga berperan penting dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan tinggi. Kondisi pendidikan di wilayah Tapal Kuda dapat dilihat melalui indikator rata-rata lama sekolah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.5.

Gambar 1. 5 RLS Wilayah Tapal Kuda 2016-2025 (Tahun)



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.5, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda selama periode 2016–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat pada seluruh daerah, meskipun masih

terdapat perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dan peningkatan capaian pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun. Namun demikian, tingkat pendidikan antar kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan.

Wilayah perkotaan, terutama Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo, secara konsisten memiliki nilai RLS tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Pada akhir periode pengamatan, RLS di kedua kota tersebut telah mendekati 10 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo masih memiliki nilai RLS yang relatif lebih rendah, meskipun mengalami peningkatan secara bertahap selama periode pengamatan.

Perbedaan nilai RLS tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di kawasan Tapal Kuda. Tingkat pendidikan yang lebih rendah berpotensi membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang lebih produktif, mengadopsi teknologi baru, serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memperluas peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi RLS di wilayah Tapal Kuda menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi salah satu faktor penting yang dapat

memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan berpotensi menciptakan perbedaan kemampuan ekonomi antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan di wilayah Tapal Kuda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan partisipasi tenaga kerja wanita. Perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pemilihan wilayah Tapal Kuda sebagai fokus penelitian didasarkan pada adanya variasi tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok antar kabupaten/kota. Variasi tersebut tercermin dari nilai Gini Ratio yang menunjukkan bahwa terdapat daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah dalam satu kawasan pembangunan yang sama. Kondisi ini menjadikan wilayah Tapal Kuda menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai perbedaan dinamika pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan antarwilayah.

Dalam penelitian ini, analisis tidak dilakukan pada seluruh kabupaten/kota secara agregat, melainkan difokuskan pada tiga daerah yang merepresentasikan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, sedang, dan

terendah berdasarkan nilai Gini Ratio selama periode 2016–2025, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Probolinggo. Pemilihan ketiga daerah tersebut bertujuan untuk membandingkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada karakteristik wilayah yang berbeda.

Perbedaan tingkat ketimpangan tersebut juga diduga mencerminkan tahapan transformasi ekonomi yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kuznets. Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena manfaat pembangunan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Namun, seiring berjalannya proses transformasi ekonomi dan meningkatnya pembangunan sosial, ketimpangan akan menurun sehingga membentuk pola kurva U-terbalik (*inverted U-curve*). Oleh karena itu, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai representasi untuk mengamati kemungkinan perbedaan tahapan transformasi ekonomi di wilayah Tapal Kuda.

Selain itu, kajian yang secara khusus membandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah dalam satu kawasan pembangunan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan, sekaligus menguji apakah pola yang terjadi pada ketiga wilayah tersebut sejalan dengan Teori Kuznets.

enelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Prasetyo dan Firdaus serta Amri dan Nazamuddin menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi justru memperbesar ketimpangan karena manfaatnya terkonsentrasi pada sektor padat modal, sementara Istikharoh et al. (2020) dan Nadila Salsavira dan Setiawati menemukan pengaruh yang tidak signifikan, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang masih homogen. Pola yang sama juga terjadi pada variabel partisipasi tenaga kerja wanita, di mana sebagian peneliti (Sari & Pratomo, 2022; Wulandari & Kuncoro, 2021) menemukan pengaruh negatif yang signifikan, sedangkan peneliti lain (Putri & Handayani, 2020; Wildan Syafitri et al., 2023) menemukan pengaruh yang tidak signifikan akibat dominasi sektor informal. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya research gap, yaitu pola pengaruh variabel-variabel tersebut yang berbeda-beda menurut karakteristik wilayah belum banyak dikaji secara sistematis, khususnya pada kawasan dengan tingkat ketimpangan yang bervariasi seperti Tapal Kuda.

Wilayah Tapal Kuda merupakan satu kawasan pengembangan dalam RTRW Provinsi Jawa Timur yang relatif homogen dari sisi kebijakan, namun menunjukkan variasi Gini Ratio yang tajam antardaerah, mulai dari kategori tinggi (Kabupaten Lumajang) hingga rendah (Kota Probolinggo). Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian, karena jika determinan ketimpangan pendapatan ternyata berbeda antarkelompok wilayah namun kebijakan pemerataan dirancang secara seragam untuk seluruh kawasan, maka intervensi tersebut berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menekan ketimpangan di masing-masing daerah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membandingkan tiga kelompok wilayah yang mewakili tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah (Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Probolinggo), menggunakan regresi linier berganda berbasis data time series yang diestimasi secara terpisah untuk masing-masing wilayah. Pendekatan ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan data panel gabungan tanpa pengelompokan berdasarkan tingkat ketimpangan, sehingga penelitian ini mampu menangkap perbedaan pola pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan sesuai posisi masing-masing wilayah dalam tahap transformasi struktural menurut Kurva U-Terbalik Kuznets.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah di wilayah Tapal Kuda selama periode 2016–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait transformasi ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji secara mendalam terkait Ketimpangan Pendapatan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan tinggi di wilayah Tapal Kuda?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan sedang di wilayah Tapal Kuda?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan rendah di wilayah Tapal Kuda?
4. Bagaimana perbandingan pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada ketiga kelompok wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio pada wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, yaitu Kabupaten Lumajang, selama periode 2016–2025.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada daerah

dengan tingkat ketimpangan sedang, yaitu Kabupaten Bondowoso, selama periode 2016–2025.

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan rendah, yaitu Kota Probolinggo, selama periode 2016–2025.
4. Membandingkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada ketiga kelompok wilayah tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik ketimpangan pendapatan.

Melalui analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada daerah dengan karakteristik ketimpangan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai relevansi Teori Kuznets dalam menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan di wilayah Tapal Kuda serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan pada wilayah dengan karakteristik ketimpangan yang berbeda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai relevansi Teori Kuznets dalam menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah di wilayah Tapal Kuda. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji transformasi ekonomi dan ketimpangan pendapatan pada tingkat regional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi, sedang, dan rendah di wilayah Tapal Kuda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih

merata sehingga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio di wilayah Tapal Kuda selama periode 2019–2025. Wilayah penelitian meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda serta menganalisis sejauh mana variabel pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Batasan penelitian ini mencakup penggunaan tiga variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproksikan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), partisipasi tenaga kerja wanita yang diproksikan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita, dan pendidikan yang diproksikan menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS). Variabel dependen yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan BPS kabupaten/kota terkait selama periode 2016–2025. Data tersebut meliputi data pertumbuhan ekonomi, TPAK wanita, rata-rata lama sekolah, dan Gini Ratio pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berbasis data time series. Analisis dilakukan pada tiga kabupaten/kota yang mewakili tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, sedang, dan terendah di wilayah Tapal Kuda. Hasil estimasi dari masing-masing model kemudian dibandingkan untuk menganalisis perbedaan pengaruh pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja wanita, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan teori Kuznets.